**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu ditetapkan Pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 5316).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Desember 2014.
 2. Rapat Paripurna III DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.

1. H. EDDY RIAN TO, SH, MH.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2. Ir. H. RUDI APRIADI, M.BA.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3. DR. Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM.	ANGGOTA
4. Ir. HOLDA, M.Si.	ANGGOTA
5. Ir. HERPANTO, M.Si.	ANGGOTA
6. Drs. H. SOLEHAN ISMAIL	ANGGOTA
7. Hj. NILAWATI	ANGGOTA

KEDUA

- : Tugas dan wewenang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Masa Jabatan Anggota Badan Kehormatan paling lama 2,5 tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 16 Desember 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

dto

H. M. GIRI RAMANDA NK, SE, MM.